



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	21 (dua puluh satu)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang).
Hari, Tanggal	:	Senin, 6 Juni 2022
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Martin Manurung, S.E, M.A/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan RKP dan RKA TA 2023;
Hadir	:	1. orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ukay Karyadi; 3. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Muhammad Rudi; dan 4. Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang), Junaidi, S.T, M.T; beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) pada pukul WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 6 Juni 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E, M.A.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI meyetujui pagu indikatif BP Batam Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah ditetapkan sebesar **Rp1.722.948.329.000,-** (*Satu Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dengan rincian program Dukungan Manajemen sebesar **Rp858.169.534.000,-** (*Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*) dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar **Rp864.778.795.000,-** (*Delapan Ratus Enam Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 yang diajukan Kepala BP Batam sebesar **Rp386.000.000.000,-** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Rupiah*) dalam bentuk Rupiah Murni untuk dapat mendanai kegiatan Prioritas Nasional di BP Batam.
3. Komisi VI DPR RI meyetujui pagu indikatif BPKS Sabang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah ditetapkan sebesar **Rp66.527.592.000,-** (*Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang bersumber dari Rupiah Murni Sebesar **Rp63.857.592.000,-** (*Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) dan Badan Layanan Umum BPKS sebesar **Rp2.670.000.000,-** (*Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 yang diajukan Plt. Kepala BPKS Sabang sebesar **Rp48.774.168.000,-** (*Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dalam bentuk Rupiah Murni untuk dapat mendanai program pengembangan strategis BPKS Sabang Tahun 2023.
5. Komisi VI DPR RI meyetujui pagu indikatif KPPU Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah ditetapkan sebesar **Rp100.814.783.000** (*Seratus Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:

- a. Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar **Rp15.411.512.000**
(Lima Belas Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
 - b. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp13.830.428.000** *(Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).*
 - c. Belanja Pegawai sebesar **Rp45.444.622.000**
(Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - d. Belanja Operasional sebesar **Rp26.128.221.000**
(Dua Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
6. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 yang diajukan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar **Rp129.269.272.000** *(Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)* untuk dapat mendanai kegiatan Prioritas di KPPU.
 7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada BP Batam, BPKS Sabang dan KPPU untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12:40 WIB.

KETUA KPPU

Ttd.

UKAY KARYADI

KEPALA BP BATAM

Ttd.

MUHAMMAD RUDI

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**MARTIN MANURUNG, S.E, M.A
A-352**

Pit. KEPALA BPKS SABANG

Ttd.

JUNAIIDI, S.T, M.T